

**TINJAUAN YURIDIS SENGKETA PEMBAGIAN
HARTA BERSAMA SETELAH PERCERAIAN
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Salatiga)**



Diajukan Sebagai Salahsatu Syarat Menyelesaikan Sarjana Strata I pada Program
Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Oleh:

SYAHRUL BASYAR BIN H. OMY

C 100 080 007

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2017**

PERSETUJUAN

TINJAUAN YURIDIS SENGKETA PEMBAGIAN HARTA BERSAMA SETELAH PERCERAIAN
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Salatiga)

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:

SYAHRUL BASYAR BIN H. OMY

C 100 080 007

Telah diperiksa dan disetujui oleh:

Mengetahui

Pembimbing 1



Nuswardhani, S.H.,M.S.

Pembimbing 2



Mutimatun Ni'ami S.H., M.Hum.

HALAMAN PENGESAHAN

TINJAUAN YURIDIS SENGKETA PEMBAGIAN HARTA BERSAMA SETELAH PERCERAIAN (Studi Kasus di Pengadilan Agama Salatiga)

Yang ditulis oleh:

Syahrul Basyar Bin H. Omy
NIM : C.100.080.007

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Fakultas Hukum

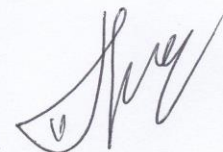
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada tanggal Januari 2017


Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji

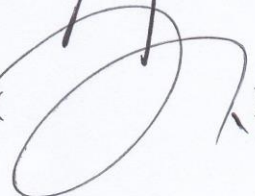
Ketua : Nuswardhani, S.H.,M.S

()

Sekretaris : Mutimatun Ni'ami S.H,M.Hum

()

Anggota : Darsono S.H,M.Hum

()

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



()
(Dr. Natangsa Surbakti, S.H.,M.Hum)

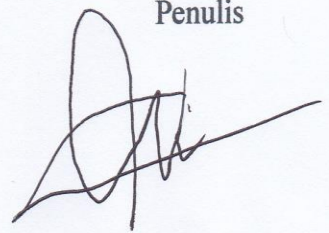
PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 6 Januari 2017

Penulis



SYAHRUL BASYAR BIN H. OMY

C100080007

TINJAUAN YURIDIS SENGKETA PEMBAGIAN HARTA BERSAMA SETELAH PERCERAIAN

(Studi Kasus di Pengadilan Agama Salatiga)

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hak-hak yang diperoleh masing-masing suami istri dari harta bersama setelah perceraian menurut hukum Islam, hukum adat, hukum perdata barat, serta pertimbangan hakim dalam pembagian harta bersama setelah dinyatakan putusan cerai. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif. Penelitian dilaksanakan di Pengadilan Negeri Salatiga. Sumber data menggunakan data sekunder berupa putusan. Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pembagian harta bersama setelah perceraian menurut hukum Islam didasarkan pada Pasal 96 dan 97 KHI bahwa masing-masing suami dan istri mendapat setengah dari harta bersama tersebut. Menurut hukum adat di Kota Salatiga yang menganut sistem kekerabatan *Parental*, maka yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis orang tua, atau menurut garis dua sisi bapak dan ibu. Apabila terjadi sengketa penyelesaiannya melalui Kantor Kepala Desa. Menurut hukum perdata adalah dibagi rata atas suami dan istri atau antara para ahli waris mereka. 2) Pertimbangan yang digunakan hakim dalam menetapkan putusan pembagian harta bersama adalah mengacu pada alat bukti dan saksi yang diajukan pihak Penggugat, sedangkan Tergugat tidak mengajukan alat bukti dan saksi. Selanjutnya harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sehingga pada saat terjadinya perceraian harta bersama tersebut dibagi sama rata antara bekas suami isteri. Pun demikian dalam perkara Nomor 1053/Pdt.G/2012/PA.Sal ini pembagian harta bersama tidak diperlukan lagi karena masing-masing pihak sepakat untuk memberikannya kepada anak mereka.

Kata Kunci: harta bersama setelah perceraian, pertimbangan hakim.

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the acquired rights of husband and wife respectively of the joint property after divorce according to Islamic law, customary law, civil law the west, as well as consideration of the judge in the division of joint property after divorce ruling stated. This research includes normative legal research. Research conducted at the District Court Salatiga. Source data using secondary data in the form of a ruling. Data were analyzed using qualitative analysis. The results showed that: 1) The division of joint property upon divorce under Islamic law based on Article 96 and 97 KHI that each husband and wife got half of the joint property. Under customary law in Salatiga who embrace Parental kinship system, then the system of descent drawn along the lines of the old, or the lines of the two sides of the father and mother. In the event of dispute settlement through the Village Head Office.

According to the civil law is divided equally over the husband and wife or between their heirs. 2) Consideration of the use of judges in determining the division of joint property decision is referring to the evidence and witnesses presented by the applicant party, while the Defendant did not submit evidence and witnesses. Furthermore, property acquired during the marriage become community property, so that at the time of divorce joint property is divided equally between the former husband and wife. Thus even in the case Number 1053 / Pdt.G / 2012 / PA.Sal division of joint property is no longer needed because each party agreed to give it to their children.

Keywords: joint property after divorce, consideration of the judge

1. PENDAHULUAN

Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam UU tersebut perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Setiap pasangan suami istri pasti mendambakan keharmonisan berumah tangga,,namun sebuah keluarga mudah mengalami hambatan-hambatan yang merupakan sumber permasalahan besar dalam keluarga, akhirnya dapat menuju keretakan keluarga yang berakibat lebih jauh sampai kepada perceraian.¹

Perceraian harus ada cukup alasan, yaitu bahwa antara suami istri tersebut tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Menurut Pasal 38 Undangundang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, putusnya perkawinan disebabkan karena 3 (tiga) hal, yaitu :1) Kematian 2) Perceraian 3) Atas keputusan Pengadilan. Terjdinya peristiwa-peristiwa dalam rumah tangga,

¹ Susanto, Happy. 208. *Pembagian Harta Gono Gini Saat Terjadinya Perceraian*, Jakarta: Visi Media. Hal. 2

yaitu perselisihan, pertengkaran atau percekocokkan antara suami istri akan mengakibatkan terjadinya perceraian, jika tidak diselesaikan dengan baik.²

Perceraian akan membawa berbagai akibat hukum, salah satunya adalah berkaitan dengan harta bersama dalam perkawinan. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tentang harta bersama, antara lain: Pasal 35 ayat (1) Menyatakan harta benda yang diperoleh sepanjang perkawinan menjadi harta bersama. (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing si penerima, para pihak tidak menentukan lain. Pasal 36 (1) Mengenai harta bersama suami dan istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. (2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bersama. Pasal 37 (1) Bilamana perkawinan putus karena perceraian maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Dalam penjelasan Pasal 37 ayat (1) ini ditegaskan hukum masing-masing ini ialah hukum Islam, hukum adat dan hukum perdata barat.

Pembagian harta bersama yang digunakan oleh suami istri setelah perceraian adalah pembagian harta bersama sesuai dengan Pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu menurut hukum Islam, hukum adat, dan perdata barat. Berdasarkan hal tersebut, maka dilakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Yuridis Pembagian Harta Bersama Akibat dari Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Salatiga).”

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: *Pertama*, bagaimanakah hak-hak yang diperoleh masing-masing suami istri dari harta bersama setelah perceraian menurut hukum Islam, hukum adat, hukum perdata barat?; *Kedua*,

² Mulyadi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2008, Hal. 6

bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menentukan pembagian harta bersama setelah dinyatakan putusan cerai di Pengadilan Agama Salatiga?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: *Pertama*, untuk mengetahui hak-hak yang diperoleh masing-masing suami istri dari harta bersama setelah perceraian menurut hukum Islam, hukum adat, hukum perdata barat; *Kedua*, untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam pembagian harta bersama setelah dinyatakan putusan cerai di Pengadilan Agama Salatiga.

2. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sumber data menggunakan data sekunder berupa putusan hakim Pengadilan Agama Salatiga. Metode pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi. Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan meliputi peraturan, literatur, dan yurisprudensi yang ada hubungannya dengan pembagian harta bersama dipadukan dengan pendapat responden di lapangan kemudian dianalisis kualitatif, dicari pemecahannya dan kemudian dapat ditarik kesimpulan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian Menurut Hukum Islam, Hukum Adat, dan Hukum Perdata

Pembagian harta bersama menurut hukum Islam karena cerai hidup dapat dilakukan secara langsung antara bekas istri dan suami dengan pembagian masing-masing separo bagian. Ketentuan ini dimaksudkan agar pembagian harta bersama pasca perceraian tidak menimbulkan sengketa. Namun jika jalan secara damai (kekeluargaan) tidak tercapai, maka penyelesaiannya harus melalui pengadilan. Pembagian harta bersama lewat Pengadilan Agama, bisa diajukan serempak dengan pengajuan gugatan perceraian (kumulatif) atau dapat pula digugat tersendiri setelah putus perceraian.

Pengajuan permohonan pembagian harta bersama dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu: 1) Pengajuan permohonan pembagian harta bersama yang disertakan pada gugatan perceraian (dilakukan secara bersamaan); 2) Pengajuan permohonan pembagian harta bersama tidak disertakan pada gugatan perceraian (diajukan secara terpisah). Pengajuan pembagian harta bersama dijadikan satu dengan gugatan perceraian memiliki beberapa keuntungan yaitu waktu yang diperlukan untuk memutus perkara cerai itu sendiri tidak memerlukan waktu yang lama, karena hakim hanya memutus tentang permohonan cerai saja.

Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian Menurut Hukum Adat. Masyarakat Kota Salatiga yang menggunakan sistem Parental, maka akibat putusnya perkawinan dapat berakibat terhadap anak dan terhadap harta perkawinan. Barang-barang milik bersama apabila terjadi perceraian dibagi antara kedua belah pihak masing-masing yang pada umumnya separuh-separuh. Pembagian harta bersama itu di bagi 2 (dua) bagian antara suami istri yaitu masing-masing mendapatkan separoh bagian sudah sesuai dengan hukum adat yang menganut sistem kekerabatan parental/bilateral di samping itu juga sudah sesuai dengan pendapat para ahli hukum adat, yakni pembagiannya separoh untuk suami dan separoh untuk istri. Sedangkan harta bawaan kembali kepada masing-masing suami atau istri yang membawanya ke dalam perkawinan.³

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa harta bawaan/harta asal tidak selamanya kembali kepada masing-masing pihak suami atau istri yang membawanya ke dalam perkawinan. Sebenarnya harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta yang diperoleh masing-masing hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Tetapi dengan lewatnya waktu lebih lima tahun harta bawaan / harta asal itu sudah bercampur menjadi harta bersama / harta gono-gini sehingga dalam pembagiannya antara suami istri adalah masing-masing $\frac{1}{2}$ bagian.

³ Ibid. Hal. 276

Pembagian tersebut sudah sesuai dengan ketentuan hukum adat yang berlaku di lingkungan masyarakat yang menganut sistem kekerabatan parental, seperti di Kota Salatiga. Yurisprudensi yang berkaitan dengan pembagian harta bersama bahwa masing-masing pihak mendapat separoh bagian adalah: Keputusan Mahkamah Agung tanggal 25 Pebruari 1959 (Reg. No. 387/K/Sip/1958 menegaskan menurut Hukum Adat yang berlaku di Jawa Tengah seorang janda mendapatkan separuh harta gono-gini”; Keputusan Mahkamah Agung tanggal 9 April 1960 (Reg. No. 120 K/Sip/1960 menetapkan “bahwa harta pencaharian itu harus dibagi sama rata antara suami istri”.

Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian Menurut Hukum Perdata. Ketentuan KUH Perdata memberi kebebasan yang seluas-luasnya kepada calon suami isteri untuk menentukan pengaturan tentang harta kekayaan mereka. Dalam KUH Perdata ditentukan, bahwa perkawinan suami isteri yang tidak didahului dengan perjanjian kawin mengakibatkan terjadinya persatuan bulat harta kekayaan perkawinan (*algehele gemeenschap van goederen*). Persatuan bulat ini meliputi harta yang mereka bawa dalam perkawinan, (barang bawaan), maupun harta yang mereka peroleh selama perkawinan (harta pencarian).⁴

Seorang laki-laki yang kawin dengan seorang wanita dengan tanpa membuat perjanjian kawin, mengakibatkan terjadinya persatuan bulat harta kekayaan perkawinan. Seluruh harta yang dibawa, maupun yang diperoleh selama perkawinan, baik harta yang merupakan hasil dari upaya sendiri maupun yang berasal dari hibah dan testamen, bercampur menjadi satu sebagai harta persatuan.

Persatuan bulat harta kekayaan perkawinan, maka dalam perkawinan tersebut pada prinsipnya hanya ada satu jenis harta kekayaan, yaitu harta bersama suami-isteri. Pasal 176 KUH Perdata mengatur pengecualian terhadap ketentuan tentang persatuan bulat harta kekayaan perkawinan, yaitu bilamana terdapat hubungan sangat pribadi antara harta dengan

⁴ Ibid. Pasal 119

pemilikinya dan bilamana suami atau isteri menerima harta secara cuma-cuma di mana si pewaris, pemberi testamen maupun penghibah menyatakan dengan tegas, bahwa harta yang diwariskan atau dihibahkan menjadi milik pribadi suami atau isteri yang menerimanya.⁵

Artinya walaupun suami istri tersebut melangsungkan perkawinan tanpa membuat perjanjian kawin, namun dalam perkawinan tersebut terdapat dua atau bahkan tiga macam harta kekayaan perkawinan, yaitu harta persatuan, harta pribadi suami dan/atau harta pribadi isteri. Jika dalam perkawinan baik suami maupun isteri masing-masing menerima secara cuma-cuma harta menurut 176 KUH Perdata, maka dalam perkawinan itu terdapat tiga jenis harta yaitu harta persatuan, harta pribadi suami dan harta pribadi isteri. Namun jika hanya salah seorang dari suami isteri tersebut yang memperoleh harta secara cuma-cuma berdasar Pasal 176 KUH Perdata, maka dalam perkawinan itu hanya terdapat dua macam harta, yaitu harta pribadi suami dengan harta persatuan atau harta pribadi isteri dengan harta persatuan.

3.2 Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Pembagian Harta Bersama Setelah Dinyatakan Putusan Cerai di Pengadilan Agama Salatiga

Berdasarkan hasil analisis terhadap Putusan Perkara Nomor 1053/Pdt.G/2012/PA.Sal yang telah diuraikan di atas, dapat diketahui bahwa pertimbangan hukum hakim dalam penyelesaian pembagian harta bersama pada perkara perceraian adalah mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Majelis Hakim mempertimbangkan keterangan penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 30 Agustus 2000 dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama CCC. Sejak bulan Desember 2006 sering terjadi perselisihan serta pertengkaran masalah ekonomi disamping itu Tergugat sering pergi dari rumah dimalam hari dan baru

⁵ Ibid. Pasal 176

pulang diesok hari tanpa tujuan yang jelas dan setiap kali ditanya Penggugat dari mana ia justru marah-marah. Sejak bulan Februari 2012 antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah ranjang.

Majelis Hakim juga mempertimbangkan jawaban Tergugat yang membenarkan posita nomor 1 – 2, posita nomor 3 tidak benar, tidak selingkuh dengan mantan isteri saya, benar saya memberi uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Posita nomor 4 tidak benar karena tetap tidur di rumah tetapi tidak sekamar dengan Penggugat dan saya tetap memberi nafkah kepada Penggugat sampai bulan Januari 2013. Tergugat bersedia bercerai dengan Penggugat tetapi harta bersama harus dibagi dua untuk Penggugat dan Tergugat, yaitu berupa rumah tembok diatas tanah milik orang tua Penggugat seluas 180 M² dengan batas-batas sebagai berikut: sebelah utara dengan gereja, sebelah timur dengan warung milik DD, sebelah selatan dengan EE, sebelah barat dengan kebun milik FF terletak di Kota Salatiga. Sertifikat tanah masih atas nama orang tua Penggugat.

Hakim mempertimbangkan bukti surat dari Penggugat berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor. Selain bukti surat, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi I (GG) yang pada intinya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa rumah tembok yang didirikan di atas tanah milik orang tua Penggugat. Saksi II (HH) yang pada intinya menyatakan bahwa pihak keluarga tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat. Penggugat dan Tergugat membangun rumah tembok di atas tanah milik orang tua Penggugat.

Hasil Putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor: 1053/Pdt.G/2012/PA.Sal seperti yang telah diuraikan dalam Amar Putusan adalah mengabulkan gugatan Penggugat dan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat). Mengenai harta bersama berupa rumah seluas 180 M² di atas tanah milik orang tua Penggugat di RT 01 RW 02, Kelurahan Blotongan, Kota Salatiga tidak

dibagi melainkan diberikan kepada anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat.

Akibat hukum dari perceraian terhadap harta bersama yaitu bahwa setelah adanya perkawinan maka harta kekayaan yang diperoleh baik dari pihak suami atau isteri menjadi harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan dan jika perkawinan putus, masing-masing berhak 1/2 (seperdua) dari harta tersebut. Karena harta bersama dalam kasus ini kepemilikan tanahnya masih oleh pihak ketiga (orang tua Penggugat) maka Hakim disini tidak memberikan putusan mengenai besarnya bagian masing-masing. Hal ini karena telah terjadi kesepakatan untuk memberikan bagian masing-masing tersebut kepada anak Penggugat dan Tergugat.

Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa semua barang yang diperoleh selama ikatan perkawinan berlangsung terhitung sejak saat akad nikah sampai dengan setelah terjadinya perceraian dapat dikategorikan sebagai harta bersama (Pasal 35 UUP No. 1 tahun 1974). Begitu juga, dengan hasil yang diperoleh dari usaha bersama suami/istri, penghasilan yang ada ketika perkawinan berlangsung dikategorikan sebagai harta bersama, kecuali apabila sebelumnya sudah ada perjanjian antara kedua belah pihak. Pada perkara Nomor 1053/Pdt.G/2012/PA.Sal tersebut terdapat pembagian harta bersama karena pihak Penggugat dapat membuktikan bahwa harta bersama yang diklaim Tergugat dibangun di atas tanah milik orang tua Penggugat.

Pertimbangan hukum yang mempengaruhi hakim dalam pembagian harta bersama diatur dalam Kompilasi Hukum Islam adalah Pasal 88 KHI yang mengatur bahwa bila terdapat sengketa atas harta bersama, maka akan diserahkan kepada Pengadilan Agama yang berwenang. Kompilasi Hukum Islam menyerahkan semua hal yang berkaitan dengan pembagian harta bersama kepada Pengadilan Agama yang berwenang menyelesaikan permohonan sengketa harta bersama tersebut. Diserahkan kepada Pengadilan Agama berarti penentuan dari perkara yang dihadapi berada

ditangan majelis hakim yang memutus perkara berdasarkan bukti-bukti yang ada dalam persidangan dan juga saksi yang diajukan masing-masing pihak.

Selanjutnya Majelis Hakim juga mempertimbangkan Pasal 97 KHI untuk menetapkan pembagian harta bersama tersebut $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk penggugat, dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk tergugat. Majelis Hakim menyatakan bahwa keadilan adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Selanjutnya keadilan dibagi dua yaitu keadilan distributif adalah memberikan kepada setiap orang jatah berdasarkan jasanya, sedangkan keadilan kumulatif adalah memberikan kepada setiap orang bagian yang sama. Namun dalam perkara Nomor 1053/Pdt.G/2012/PA.Sal ini pembagian tidak diperlukan lagi karena masing-masing pihak sepakat untuk memberikannya kepada anak mereka.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pertama, pembagian harta bersama setelah perceraian menurut hukum Islam adalah didasarkan pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) khususnya pada Pasal 96 dan 97 KHI, yang menyebutkan bahwa pembagian harta bersama baik cerai hidup maupun cerai mati ini, masing-masing mendapat setengah dari harta bersama tersebut. Pembagian harta bersama setelah perceraian menurut hukum adat adalah menganut sistem kekerabatan *Parental*, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis orang tua, atau menurut garis dua sisi bapak dan ibu, sehingga pembagiannya masing-masing suami istri mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama / harta gono gini tersebut. Pembagian harta bersama setelah perceraian menurut hukum perdata adalah merujuk pada Pasal 119-138 KUHPdata, yaitu dibagi rata atas suami dan istri, tanpa mempersoalkan darimana dan siapa yang memperoleh harta tersebut juga terdaftar atas nama siapa.

Kedua, pertimbangan yang digunakan hakim dalam menetapkan putusan pembagian harta bersama setelah perceraian adalah mengacu pada alat

bukti dan saksi yang diajukan pihak Penggugat, sedangkan Tergugat tidak mengajukan alat bukti dan saksi. Selanjutnya harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sehingga pada saat terjadinya perceraian harta bersama tersebut dibagi sama rata antara bekas suami isteri. Pun demikian dalam perkara Nomor 1053/Pdt.G/2012/PA.Sal ini pembagian harta bersama tidak diperlukan lagi karena masing-masing pihak sepakat untuk memberikannya kepada anak mereka.

4.2 Saran

Pertama, kepada masyarakat hendaknya mempertimbangkan secara matang terlebih dahulu sebelum memutuskan mengambil langkah bercerai mengingat begitu kompleksnya dampak yang ditimbulkan bagi pasangan dan anak-anak hasil perkawinan. Perceraian bukanlah cara penyelesaian masalah yang terbaik.

Kedua, kepada masyarakat perlu diketahui bahwa sistem mengajukan perkara pembagian harta gono gini yang sudah diatur dalam Undang-undang Perkawinan dan KHI, khususnya yang menentukan bahwa perkara pembagian harta gono gini dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak atau gugatan cerai ternyata lebih efektif praktis bagi penggugat serta lebih mempercepat proses penyelesaian perkara.

Ketiga, kepada Pengadilan Agama diharapkan dapat mengembangkan mekanisme pencegahan perceraian dalam masyarakat. Perlu adanya penyuluhan hukum bagi masyarakat agar mengerti akan hak dan kewajibannya, terutama hukum keluarga sekaligus mensosialisasikan Kompilasi Hukum Islam agar dapat terwujud menjadi penegakan hukum di Pengadilan Agama. Sebagai langkah antisipasi agar harta bersama memperoleh penyelesaian yang secara damai maka untuk menjaga harta masing-masing maupun harta bersama yang dimiliki maka sebaiknya sebelum pernikahan dilangsungkan ataupun setelah dilangsungkan membuat perjanjian kawin yang didalamnya menjelaskan tentang harta yang dimiliki.

Keempat, kepada Kantor Urusan Agama perlu dilakukan penyuluhan hukum terhadap calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan dan juga kepada masyarakat sehingga mereka akan mengetahui hak dan kewajibannya bilamana dikemudian hari terjadi perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman, 1995. *Kompilasi Hukum di Indonesia*, Jakarta : Akademika Presindo.

Haar, Ter BZN, 2002. *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, terjemahan Soebakti Poesponoto, Jakarta: Pradnya Paramita

Mulyadi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang

Saragih, Djaren. 1992. *Hukum Perkawinan Adat dan Undang-undang tentang Perkawinan serta peraturan pelaksanaannya*, Tarsito, Bandung.

Soekanto, Soerjono. 1999, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Pers.

Susanto, Happy. 2008. *Pembagian Harta Gono Gini Saat Terjadinya Perceraian*, Jakarta: Visi Media

Wantjik, Saleh. 1990. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang *Peradilan Agama*